

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan diarahkan pada pembentukan manusia yang diidamkan melalui proses pembelajaran, bimbingan dan pelatihan. Pendidikan diharapkan menghasilkan insan-insan yang mempunyai integritas pribadi yang utuh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab. I, Pasal 1, menyatakan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal II Bab III bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengelola pendidikan mempunyai beban yang sangat berat namun demikian, semua itu merupakan usaha yang sangat mulia, mengemban amanat untuk mewujudkan pembangunan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya pengelolaan pendidikan yang profesional, pemerintah mencoba dan menerapkan berbagai inovasi diantaranya manajemen berbasis sekolah, yang dilaksanakan berdasarkan UU.No. 22 Tahun 1999. Inovasi dituangkan dalam konsep otonomi daerah melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk merealisasikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Pada saat reformasi, sistem pendidikan yang sentralistik berubah menjadi sistem otonomi di segala bidang, baik bidang pemerintahan maupun bidang pengelolaan pendidikan. Reformasi di bidang pendidikan menyebabkan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Siapkah daerah mengelola pendidikan? Jawabannya, tentu tergantung pada pemberlakuan UU 22/99 tentang Pemerintah Daerah dan PP 25/2000 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Jika peraturan itu diberlakukan segera dan simultan, maka kita akan menyaksikan penyelenggaraan pendidikan yang aneka rupa di berbagai daerah. Otonomisasi pendidikan, memang bukan soal sederhana karena kompleksnya permasalahan. Potensi dan kesiapan masing-masing daerah, berbeda-beda.

Daerah bakal menjadi penguasa dalam segala hal, tak terkecuali untuk bidang pengelolaan pendidikan. PP No. 25 tahun 2000 menjelaskan,

pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah, disertai dengan kewenangan untuk memperoleh dan mendayagunakan segala potensi yang disediakan. Secara rinci kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam pendidikan diatur secara proporsional dalam kaitan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan ini menyangkut dan mempertimbangkan ruang lingkup, kepentingan serta potensi, sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada pada tiap level pemerintahan

Selama ini terutama sebelum era desentralisasi dan reformasi, pengelolaan pendidikan di banyak sekolah sangat tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid dan sebagian besar guru tidak banyak mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah, tidak mengetahui pendapatan dan belanja sekolah, tidak dilibatkan di dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekolah, dan sebagainya.

Pengelolaan sekolah yang tidak transparan berdampak negatif bagi pengembangan sekolah karena masyarakat dan orang tua murid akan meragukan apakah sumbangan yang mereka berikan akan benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan. Di lain pihak, Pimpinan sekolah yang menerapkan pengelolaan tertutup merasa bahwa pihak lain tidak perlu ikut campur dengan masalah pengelolaan sekolah karena sudah cukup ditangani oleh Kepala Sekolah dan satu dua orang staf kepercayaan

kepala sekolah. Mereka khawatir “keterbukaan” akan sangat merepotkan dan tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi sekolah

Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang dirancang pada tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa rumitnya permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara menyeluruh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Pengelolaan sekolah yang otonom menawarkan keleluasaan pada pihak sekolah dalam pengelolaan sekolah untuk menggali potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi yang profesional. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengelolaan sekolah yang otonom perlu seperangkat kewajiban dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tinggi kepada masyarakat. Dengan demikian, kepala sekolah harus mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab baik kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kepada siswa.

Memang ironis, tatkala praktek manajemen pendidikan telah menunjukkan perubahan yang berarti pada level menengah (provinsi dan kabupaten/kota), dimana secara terstruktur, manajemen pendidikan yang diterapkan sekarang ini indikasi efisiensi, tetapi pada level sekolah masih terjadi kekacauan. Persoalan yang terjadi sekarang adalah mengapa

strukturalisasi tersebut hanya terjadi pada instansi kependidikan atau pada level penyelenggara (lembaga yang memberikan layanan teknis), sementara pada tingkat sekolah, perubahan manajemen belum menunjukkan arti “sebenarnya” seperti yang diambakan setiap pelaku pendidikan. Sekolah tetap saja menerapkan pola lama hal ini disebabkan ketidakpahaman untuk menerapkan pola baru manajemen berbasis kebutuhan sekolah. Perubahan yang terjadi pada tataran sekolah hanya sebatas slogan.

Masih perlu waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk sekolah bisa melaksanakan manajemen sekolah yang benar-benar sesuai dengan yang direncanakan tapi setidaknya dengan adanya manajemen sekolah ini, sekolah diharapkan sedikit besarnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi pada pemerintah pusat. Pada otonomi daerah, pengelolaan sekolah menjadi sorotan baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat sendiri yang merupakan konsumen terbesar dari pendidikan.

Pengelolaan sekolah yang transparan sangat dinantikan oleh masyarakat. Sekolah dituntut untuk terbuka dalam hal pengelolaan sekolahnya oleh sebab itu sekolah memiliki ‘kewajiban baru’ yaitu pertanggungjawaban mengenai pengelolaan sekolah kepada masyarakat dan *stakeholder*.

Pada kenyataannya, karena sekolah mendidik anak-anak yang berasal dari masyarakat, maka sekolah harus bertanggung jawab juga pada masyarakat. Seperti yang dijelaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya

terhadap pengelolaan keuangan sekolah saja, tapi ada berbagai macam faktor yang perlu dipertanggung jawabkan oleh pihak sekolah terhadap masyarakat, yaitu :

- a. Kinerja guru
- b. Perilaku guru
- c. Kesejahteraan guru
- d. Pelaksanaan pembelajaran
- e. Pelaksanaan rencana sekolah
- f. Kekurangan tenaga pengajar
- g. Keadaan fisik gedung
- h. Keuangan sekolah
- i. Keuangan BP3/komite sekolah.

(Faesol Muslim, dkk: 200)

Otonomi dalam bidang pendidikan menjadikan pengelolaan pendidikan mendapat perhatian yang penuh dari masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi setiap pembelajaran. Ini mendorong sekolah untuk lebih terbuka dan memberikan peluang terhadap warga sekolah baik itu yang terkait langsung dengan sekolah ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah.

Adanya kekhawatiran dari pihak sekolah terhadap pengelolaan sekolah yang terbuka lebar dan dapat diakses oleh warga sekolah yang akan menimbulkan masalah. Sebenarnya kekhawatiran seperti itu tidak perlu, karena pengalaman lapangan menunjukkan bahwa semakin tinggi

transparansi pengelolaan suatu sekolah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat dan rasa memiliki sekolah. Selain itu semakin banyak sumbangan pemikiran, dana dan fasilitas lain yang diperoleh sekolah dari masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu wadah atau media yang sangat urgen bagi masyarakat dalam memudahkan penyampaian pendapatnya, kerap menjadi salah satu kendala tersendiri dalam memaksimalkan peran partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu penyediaan sarana maupun jalur komunikasi yang efektif meliputi pertemuan-pertemuan atau rembuk-rembuk umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik tertulis maupun tidak tertulis.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam pengelolaan sekolah yang otonom sangat diperlukan sekali partisipasi dari warga sekolah yang dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan suatu sekolah. Bila tidak ditunjang oleh partisipasi yang aktif dari warga sekolah, maka sekolah tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh sekolah. Yang dimaksud

partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002: 20)

Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik, dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

- a. Partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan jaringan *civil society* (inisiatif asosiasi)
- b. Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan, *civil society* sebagai *service provider*
- c. Lokal kultur pemerintah
- d. Faktor-faktor lainnya, transparansi, substansi proses terbuka dan konsentrasi pada kompetisi. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah :

- a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses oleh publik.
- b. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk

aktivitas warga sekolah dalam kegiatan publik,

- c. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan

Publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh warga sekolah akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan.

1.3 Batasan Masalah

Otonomi daerah telah memberi keleluasaan pada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah hanya mengawasi dan memberi pedoman-pedoman yang perlu dijalankan oleh sekolah. Otonomi daerah disatu sisi memberikan kemudahan pada sekolah untuk memenej sendiri dan tidak membatasi kreatifitas sekolah untuk berkreasi dan menjadikan sekolah semakin kreatif tapi disatu sisi sekolah belum bisa menjalankan apa yang dituntut dari otonomi daerah itu sendiri yaitu transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan sekolah kepada masyarakat yang merupakan konsumen terbesar pendidikan.

Masalah yang dihadapi sekolah dalam menjalani otonomi dalam pendidikan adalah masalah subsidi dana yang terbatas dari pemerintah pusat yang biasanya cukup untuk menjalankan aktifitas pembelajaran setelah adanya otonomi subsidi dana untuk pelaksanaan pembelajaran

menjadi berkurang sehingga sekolah diharuskan kreatif dan inovatif untuk mencari sumber dana sendiri tanpa membebani orang tua murid.

Otonomi dalam pendidikan merupakan cara baru untuk membuat sekolah lebih mandiri tapi hal itu membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga sekolah bisa menjalankan manajemen sekolah yang benar-benar sesuai dengan harapan pemerintah, karena selama bertahun-tahun sistem pendidikan bersifat sentralisasi, terpusat di pemerintah. Jadi sekolah masih membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan sistem yang baru.

1.4 Rumusan Masalah

Kita tidak sependapat ada upaya yang mengekang kebebasan sekolah, akan tetapi segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah semestinya harus dipertanggungjawabkan kepada sekolah. Selama dekade terakhir, akuntabilitas itu hanya dilakukan sekolah pada atasannya, sesuai dengan alur birokrasi yang berlaku dimana substansi laporan berkaitan dengan keunggulan-keunggulan sekolah. Mengapa sistem akuntabilitas belum merupakan hal sangat prinsip dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu? Sekolah yang berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat, dimana lulusannya dipakai oleh masyarakat. Maka tujuan akuntabilitas tu sangat tepat diberikan kepada masyarakat, apakah itu orang tua, atau pengguna jasa pendidikan lainnya. Tentunya dalam format yang mengacu pada konsep baru yang ideal.

Salah satu aspek yang sangat “urgen” untuk difokuskan dalam akuntabilitas manajemen sekolah adalah efisiensi manajemen itu sendiri. Sesungguhnya efisiensi berkaitan dengan pencapaian target, waktu, penggunaan fasilitas dan sumber daya manusia. Manajemen yang efisien sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan. Manajemen sekolah bergantung pada kualitas kinerja kepala sekolah, baik bersumber dari kemampuan manajerial maupun kemampuan operasional yang dikemas dalam kepemimpinan kepala sekolah. Demikian penting manajemen yang efisien dalam rangka merealisasikan seluruh program pendidikan di sekolah, sangat beralasan bahwa akuntabilitas diberikan sebagai informasi tentang jaminan mutu yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Dalam pelaksanaan partisipasi, sekolah hendaknya menyediakan sarana yang menunjang pelaksanaan partisipasi tersebut misalnya dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan partisipasi publik dimulai dari penyelenggaraan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan seluruh perwakilan stakeholders secara selektif. Dari berbagai diskusi tersebut dapat diketahui format dan bentuk partisipasi seperti apa yang dikehendaki oleh warga sekolah tersebut.

Dalam pelaksanaannya akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari adanya transparansi yang menyangkut keterbukaan pihak sekolah dalam pengelolaan sekolahnya yang mana ini akan berdampak pada tingkat partisipasi yang diberikan oleh warga sekolah tersebut. Jadi secara tidak

langsung transparansi akan sangat berhubungan dengan kedua aspek tersebut.

Dari uraian di atas rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah di SMA Negeri I Lembang ?
2. Bagaimana Partisipasi Warga Sekolah di SMA Negeri I Lembang ?
3. Bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Terhadap Partisipasi Warga Sekolah Di SMA Negeri I Lembang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan tolak ukur keberhasilannya dapat dijadikan pedoman, maka dalam penelitian ini dirumuskan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memperoleh gambaran serta informasi yang jelas mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Terhadap Partisipasi Warga Sekolah Di SMA Negeri I Lembang.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang akan diacapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Di SMA Negeri I Lembang.
- b) Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Warga Sekolah di SMA Negeri I Lembang

- c) Untuk memperoleh gambaran yang lebih terinci bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Terhadap Partisipasi Warga Sekolah di SMA Negeri I Lembang.

1.6 Asumsi Dasar

Anggapan Dasar merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya dapat diterima oleh peneliti. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Winarno Surakhmad (1998:93) bahwa : “Anggapan dasar merupakan suatu titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”.

Lebih lanjut, Suharsimi Arikunto (1998:59) mengemukakan bahwa :

Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas yang berfaedah untuk memperkuat permasalahan dan membantu penelitian dalam memperjelas dan menetapkan objek penelitian, wilayah pengambilan data, instrument pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah:

- a. Usaha pimpinan sekolah untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program sekolah melalui usaha orang lain, dengan proses dan prosedur, perangsangan, dan pengorganisasian, pengarahan dan pembinaan pada pelaksanaan dengan pemanfaatan material dan fasilitas.

- b. Pengelolaan sekolah itu merupakan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan melibatkan kerjasama sekelompok manusia dalam menggunakan sumber daya manusia itu sendiri maupun non manusia secara efektif dan efisien.
- c. Warga sekolah merupakan komponen yang sangat mendukung berjalannya suatu sekolah dan turut menentukan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah yang bersangkutan. Komponen warga sekolah yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pegawai sekolah, orang tua siswa, komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah.
- d. Kemampuan warga sekolah baik langsung dan tidak langsung untuk mengerti dan bersuara atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan (politis)
- e. Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu penelitian (Freankel dan Wallen, 1990:40). Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam

penelitian. Hipotesis belum tentu benar. Benar tidaknya suatu hipotesis tergantung hasil pengujian dari data empiris.

Pernyataan diterima atau ditolaknya hipotesis tidak dapat diidentikan dengan pernyataan keberhasilan atau kegagalan penelitian. Perumusan hipotesis ditujukan untuk landasan logis dan pemberi arah kepada proses pengumpulan data serta proses penyelidikan itu sendiri (John W. Best, dalam Sanapiah Paisal, 1982).

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: **“Terdapat Pengaruh yang Kuat dan Signifikan Antara Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Terhadap Partisipasi Warga Sekolah di SMA Negeri I Lembang”**.

Adapun variabel dari hipotesis diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Skema Hipotesis Penelitian

Keterangan:

X = Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah

Y = Partisipasi Warga Sekolah

→ = Garis penghubung yang menunjukkan adanya pengaruh

Berdasarkan bagan diatas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa variabel X merupakan variabel independen yaitu “Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah” yang memberikan pengaruh terhadap variabel Y yang merupakan variabel dependen yaitu “Partisipasi Warga Sekolah”.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dipergunakan dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Winarno Surakhmad (1998:131) adalah sebagai berikut:

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama itu dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidik.

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan filosofis dan ideology pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu metode penelitian memiliki rancangan penelitian (*research design*) tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus

ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi arti apa data dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah.

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain.

Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, memanipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual ataupun kelompok, dan menggunakan angka-angka.

Mengenai metode deskriptif ini, Mohammad. Nazir (1999:63) mengemukakan bahwa :

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sesuai dengan pendapat diatas, dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik masalah yang diteliti. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif dan untuk mendukung serta mempertajam dalam menganalisis masalah digunakan study kepustakaan/study bibliografis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Sementara yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran diantara variabel-variabel tersebut.

2) Study Kepustakaan

Study kepustakaan merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Pada waktu mengidentifikasi masalah, diperlukan study kepustakaan berkenaan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen berkenaan dengan data atau informasi tentang pendidikan. Dalam merumuskan masalah atau memetakan variabel-variabel atau aspek-aspek yang berhubungan dengan fokus masalah study kepustakaan sangat diperlukan. Hubungan antara variabel-variabel dalam perumusan masalah merupakan hubungan variabel secara teoritis, oleh karena itu sangat diperlukan dukungan dari sisi teori. Untuk mencari dan memilih teori yang cocok, yang bisa memperkuat rumusan masalah harus dicari dari study kepustakaan.

1.9 Lokasi dan Sampel Penelitian

Penentuan populasi penelitian merupakan hal yang sangat penting sebelum menentukan sampel karena kejelasan permasalahan penelitian yang dirumuskan sangat berhubungan dengan penetapan sasaran populasi tersebut.

Sesuai dengan hal tersebut, dalam penelitian perlu ada penentuan populasi. Populasi dapat memberikan informasi atau data yang berguna bagi suatu penelitian. Tanpa populasi penelitian tidak mungkin dapat dilaksanakan. Menurut Freankel dan Wallen (1990:68) yang dikutip oleh Yatim Riyanto bahwa : “populasi adalah kelompok yang menarik peneliti, dimana kelompok tersebut oleh peneliti dijadikan sebagai objek untuk menggeneralisasikan hasil penelitian”.

Kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan pokok yang menjadi sorotan peneliti adalah “Pengaruh Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Terhadap Partisipasi Warga Sekolah di SMA Negeri I Lembang”. Sesuai dengan permasalahan dan jenis instrumen yang dipergunakan, maka sebagai populasi dalam penelitian ini adalah warga sekolah yang didalamnya mencakup guru-guru, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat sekitar sekolah dan stakeholder. Jumlah guru keseluruhan yang ada di SMA I Lembang adalah 72 orang . Melihat keberhasilan SMA Negeri I Lembang dalam membangun hubungan yang baik dengan warga sekolahnya, maka lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk penelitian ini adalah SMA Negeri I Lembang.